

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review.

Bantuan luar negeri Cina ke Indonesia menjadi sangat penting dilakukan karena pertumbuhan ekonomi Cina berkembang pesat selama beberapa dekade. Pertumbuhan ini telah menjadikan Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru. Sementara Cina terus memperkuat ekonominya, beberapa negara di bagian dunia lainnya sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Hal ini berarti memberikan harapan baru bagi banyak negara untuk bekerjasama dengan Cina, tidak terkecuali Indonesia, dimana Indonesia merupakan ladang investasi yang cukup menggiurkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah *pertama*, bagi Indonesia, Cina memberikan dampak positif karena Cina sangat membutuhkan bahan baku dari Indonesia terhadap industri di Cina, dimana Indonesia dipandang sebagai pasar yang siap menampung kebanjiran produk dari negara tersebut. *Kedua*, Cina memberikan dampak negative bagi persaingan tenaga kerja yang mengakibatkan ketimpangan sosial antara tenaga kerja asal Cina dengan tenaga kerja dalam negeri. *Ketiga*, bantuan luar negeri Cina tidak bernilai suka rela dimana bantuan tersebut bertujuan untuk melaksanakan sistem one belt diplomacy of China demi menguasai jalur strategis perdagangan internasional di Indonesia. (Rinanda Siregar, 2016)

Infrastuktur dibangun guna untuk meningkatkan ekonomi disuatu negara yang berfungsi untuk menekan angka produksi, mempermudah pengiriman, dan tentunya menghemat waktu, serta komunikasi antar wilayah yang dapat terselesaikan dengan cepat. Tiongkok adalah salah

satu negara yang masuk ke dalam jajaran mitra strategis Indonesia dalam hal penanaman investasi untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol. Hal ini terjadi karena berbagai faktor pendorong yang dilakukan Indonesia untuk menarik investasi tersebut. Diantaranya berbagai pembuatan kebijakan dari mulai sistem satu pintu, investasi 3 jam, dan pemberian tax bagi investor-investor asing. Landasan teori yang digunakan adalah Diplomasi, Diplomasi Ekonomi, kepentingan nasional, Foreign Direct Investment, kebijakan luar negeri. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa terbukti investasi Tiongkok meningkatkan dikarenakan upaya diplomasi dalam mempermudah masuknya investasi Tiongkok. Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui BKPM berupa promosi, kunjungan kerja, market sounding. (Febriyanti Putri Manroe, 2019)

Tabel 2.1
Literature Review

Judul	Persamaan	Perbedaan
Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina) Penulis : Reva Rinanda Siregar, Jurnal Politik Ekonomi Universitas Riau, 22 October 2015	Investasi Cina di Indonesia	Fokus ke Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina
Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Tiongkok dalam Meningkatkan Investasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Di Indonesia Tahun 2015-2018 Penulis : Febriyanti Putri Manroe, Universitas	Diplomasi ekonomi Tiongkok	Investasi jalan Tol di Indonesia

B. Teori Hubungan Internasional.

Hubungan antar bangsa dan negara dewasa ini merupakan tuntunan bagi setiap bangsa. Karenanya, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan ekonomi politik yang berkembang di Kawasan Asia Timur sebagai pengaruh dari semakin kuatnya perekonomian Cina di kawasan Asia pada umumnya.

Pertumbuhan ekonomi Cina selama ini, memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat. Namun, satu hal yang banyak dilupakan oleh masyarakat, termasuk lembaga dunia, yakni apakah laju pertumbuhan yang tinggi itu didapat dengan kekuatan sendiri tanpa terlalu tergantung dengan bantuan asing, khususnya modal jangka pendek. Oleh karena itu, sebelum memasuki wilayah ekonomi ada baiknya penulis sampaikan pengertian hubungan internasional, sebagai berikut : *“Hubungan internasional : mencakup segala bidang hubungan antar bangsa-bangsa dan kelompok masyarakat dunia dan kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup dan cara bertindak, cara berfikir manusia, dalam masyarakat dunia”*. (Holsti, 1987)

Secara umum pendapat di atas menjelaskan, bahwa terjadinya hubungan internasional karena adanya aksi dari suatu negara yang direspon oleh negara lain. Adapun bentuk reaksi itu bisa saja berupa tekanan, cara berfikir, bertindak dalam menentukan kekuatan masyarakat. Artinya, hubungan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara akan tetapi bisa terjadi antar masyarakat dunia maupun antar individu suatu negara yang melakukan komunikasi maupun interaksi dengan individu negara lain.

C. Teori Kerjasama Ekonomi Internasional dan Perdagangan Luar Negeri.

Hubungan internasional menghendaki adanya kerjasama internasional, oleh karena dalam kerjasama internasional mengukuhkan kerangka hubungan internasional yang saling percaya dan saling pengertian, dengan demikian arah dari hubungan internasional itu dapat ditentukan pada pola yang saling menguntungkan. Penulis menyampaikan definisi kerjasama internasional, sebagai berikut :

Kerjasama Internasional : Kerjasama terjadi karena nation understanding dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama serta keinginan internasional dan saling membutuhkan. Kerjasama itu sendiri didasari oleh kepentingan bersama, diantara negara-negara namun kepentingan tersebut tidak identik. (Wiriaatmadja, 1970)

Arah dan tujuan kerjasama internasional tersebut tentunya diharapkan bisa saling menguntungkan, dalam hal ini kerjasasama internasional senantiasa membawa dampak pada struktur perekonomian suatu negara. Sehingga diperlukan suatu mekanisme ekonomi internasional yang jelas untuk menentun saling ketergantungan yang ada menjadi potensi bagi pengembangan ekonomi nasional. Sependapat dengan hal di atas, penulis menyampaikan definisi ekonomi internasional, sebagai berikut : *“Ekonomi internasional adalah : suatu aktivitas dari ekonomi yang ditimbulkan oleh keadaan saling ketergantungan unit – unit politik yang melintasi batas-batas negara dan bersifat internasional”*. (Dyer Hugh C. & Mangasarian, n.d.)

Pada ekonomi internasional tentunya akan terjadi perdagangan internasional, terutama pada era perdagangan bebas, dimana selera masyarakat (konsumen) dunia semakin kompleks dan teknologi semakin besar, produk yang akan laku dipasar global adalah barang-barang yang mengandung teknologi tinggi dengan nilai tambah besar.

Memperhatikan paparan di atas, menunjukkan antara ekonomi internasional dengan perdagangan luar negeri memiliki hubungan yang sangat erat, oleh karenanya penulis sampaikan definisi perdagangan luar negeri, sebagai berikut :

Perdagangan luar negeri hanyalah istilah atau kependekan dari kegiatan pertukaran antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, dari segi ini perdagangan internasional tidak berbeda pertukaran antara dua orang didalam suatu negara, perbedaannya adalah didalam perdagangan internasional. yang merupakan suatu kebenaran. (Brahm, 2002)

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional yang mendukung perekonomian Cina. Kondisi ini sangat penting karena menyakut proses pertumbuhan ekspor Cina yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin valas.

D. Teori Kawasan dan Perdagangan Ekonomi Cina.

Sebelum memahami perekonomian Cina secara teoritis, penulis sampaikan pendapat mengenai kawasan Asia Timur yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, T. May Rudy menjabarkan pengertian kawasan Asia Timur sebagai berikut :

Kawasan suatu sub-kawasan Asia Timur mencakup wilayah Asia dibagian Timur yang berarti di pesisir Barat Samudera Pasifik. Dalam literatur Barat, sub-kawasan ini selalu di sebut Timur Jauh (*the Far-East*). Posisi sentral di Asia Timur, sejak masa lalu sampai masa kini berkisar pada Jepang dan Republik Rakyat Cina. Wilayah ini terdiri dari negara-negara : Jepang, Republik Rakyat Cina, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia, dan Hongkong (Hongkong bukan suatu negara, hanya sebagai wilayah yang pemerintahannya serta kedaulatannya di pegang oleh negara induknya, yaitu Inggris, Oleh karena itu, di sebut Non Self Governing Territory/wilayah tidak berpemerintahan sendiri, yang disingkat NSGT. Setelah 30 Juni 1997, Hongkong juga bukan suatu negara, tetapi hanya beralih kedaulatan negara induknya dari tangan Inggris ke tangan RRC, sebagai Daerah Administerasi Khusus/SAR-*Special Administrative Region*). (Rudy, 1994)

Di kawasan Asia Timur peranan Cina dan Jepang dalam politik maupun ekonomi senantiasa dijadikan barometer bagi kebijakan pemerintahan negara lainnya di Kawasan Asia Timur, karena baik Jepang maupun Cina memiliki dua potensi yang berbeda, Cina memiliki sumber daya manusia yang secara kuantitas melimpah sedang Jepang minim dengan jumlah penduduk namun potensial secara ekonomis. Dalam bidang politik, Cina Jelas memiliki hak veto dan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan Jepang memiliki hubungan khusus dan istimewa dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat.

Kondisi perekonomian Cina yang pesat, menjadi pertimbangan strategis bagi negara-negara maju dalam melihat Cina secara keseluruhan, karena adanya kekhawatiran barat dengan bangkitnya ekonomi Cina sebagai suatu kekuatan ekonomi dunia di Kawasan Asia Timur, sejalan dengan pemikiran tersebut disampaikan, oleh Laurence J. Brahm, sebagai berikut :

Pertumbuhan perekonomian Cina mempersembahkan gabungan pandangan dari spesialis terkemuka dalam berbagai bidang yang perlu diketahui oleh para pengambil keputusan di seluruh dunia, entah dalam bisnis, profesi, keuangan, media massa, diplomasi ataupun politik dalam mengevaluasi pertumbuhan Cina dan potensinya di masa depan. (Brahm, 2002)

Hasil evaluasi dan reformasi yang terus dikembangkan Cina berdampak pada terbukanya system perekonomian Cina dewasa ini, sehingga Cina merupakan pasar investasi yang memiliki daya saing cukup signifikan dengan negara-negara lain di Kawasan Timur.

Bukti keseriusan Cina dalam mengembangkan ekonominya terlihat dari :

Cina sedang mempercepat proses penggabungan dirinya ke World Trade Organization (organisasi perdagangan dunia), yang dipercaya akan menyertai titik balik yang sangat penting dalam menggabungkan diri dengan WTO ini adalah sikap terbukanya terhadap pihak luar darimana suatu zaman baru akan berkembang. (Jatmiko, 2000)

Masuknya Cina menjadi anggota WTO berdampak pada banyaknya nilai investasi ke Cina, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin pesat dan jumlah pengangguran dapat ditekan

hampir 50 persen dari angkatan kerja sampai tahun 2002. Pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat ini, tentunya ditunjang oleh ekonomi kawasan Asia Timur yang baru keluar dari kesulitan ekonominya. Untuk itu, ada baiknya penulis sampaikan perkembangan perekonomian kawasan Asia Timur, sebagai berikut :

Jalan sutera bukan saja suatu jaringan rute perdagangan. Kontak-kontak antar negara serta bangsa yang terpisah jauh membawa kepada pemupukan silang keterampilan teknis serta ide-ide. Para pedagang ini disertai oleh para usahawan, ketika kapal-kapal dari Eropa mencapai pantai-pantai di negara-negara Asia Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahunnya mencapai 20 persen dari total ekspor dan mencapai kenaikan *Growth Nasional Product* rata-rata 8 persen. (Yatsuko, 2002)

Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 20 persen dengan pertumbuhan produk nasionalnya rata-rata delapan persen, tentunya memiliki tingkat kemakmuran yang lebih baik dari negara-negara di Asia Tenggara umumnya. Cina sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari peranan negara-negara tetangga yaitu negara-negara di Kawasan Asia Timur yang cenderung mengalami penguatan kurs setelah krisis ekonomi Asia tahun 1997. Produk-produk dari negara-negara Asia Timur mulai merambah seluruh kawasan Asia, seperti mobil dan produk elektronik buatan Korea Selatan, perangkat teknologi informasi dari Taiwan, sepeda motor *made in* Cina dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew, menyampaikan pandangan optimistik terhadap perkembangan ekonomi Asia Timur yang diikuti oleh Yatsuko Mao, sebagai berikut :

...dalam 50 tahun ke depan, negara-negara Asia Timur akan mampu menggeser produk Jepang di Asia, dan menjadikan kawasan Asia sebagai wilayah pemasaran produknya yang menguntungkan, hal itu dimungkinkan karena Asia pada umumnya memiliki jumlah manusia yang cukup tinggi di dunia. (Yatsuko, 2002)

Rasa optimis yang disampaikan Lee Kuan Yeuw, bukanlah suatu analisis yang mentah, akan tetapi merupakan analisis prospektif dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan Asia Timur terkecuali dengan Korea Utara yang masih menjalankan kebijakan tertutup untuk investasi asing.

E. Konsep Perkembangan Ekonomi Indonesia.

Berkembang pesatnya kawasan Asia Timur, tidak dapat dilepaskan dari peranan Jepang yang masih dominan secara ekonomi, oleh karenanya penulis sampaikan perkembangan ekonomi Indonesia, sebagai berikut :

Ekonomi Indonesia dapat mencapai kemakmuran di segala bidang, pertama, dicapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dasa warsa 80-an, kedua, dicapainya distribusi kekayaan relatif merata diantar kota, ketiga, sukses industrialisasinya dan ekspor diseluruh dunia membawa Indonesia sebagai salah satu negara yang disegani. (Kompas, 2021)

Kemajuan ekonomi yang dialami oleh Indonesia tidak bisa dilepaskan dari investasi asing terutama dari negara-negara maju, oleh karenanya investasi merupakan modal dasar bagi penggerakan perekonomian nasional. Sehingga, investasi dapat mendorong pertumbuhan suatu negara. Investasi asing merupakan motor pertumbuhan. Inti teorinya adalah setiap negara akan melakukan investasi dengan memilih *comparative advantage* yakni, barang yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut dalam jumlah yang besar dan mengimport barang yang *comparative advantagenya* kecil. Dengan demikian peranan investasi asing dalam pertumbuhan ekonomi cukup besar. Kenaikan investasi akan memperbesar potensi pertumbuhan ekonomi. (Gie, 1996)

Kegagalan yang sering terjadi dalam investasi adalah adanya perbedaan antara kebijakan pemerintah, dimana pemerintah negara yang merebut dominasi memberikan lebih banyak dukungan bagi suatu industri dari suatu pemerintah dari negara yang kehilangan

kepemimpinannya itu. Dari sektor ke sektor pemerintah Jepang telah memberikan semangat kepada pengusaha industrinya untuk mengekspor perdagangan dan memproteksi pengusaha perdagangan mereka melawan import. (Gie, 1996)

F. Proses Kewarganegaraan dalam Perspektif Hubungan Internasional.

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, masalah hubungan internasional merupakan masalah yang mendapat perhatian mendalam, hal ini karena berkaitan dengan interaksi antar negara. Istilah Hubungan Internasional itu sendiri menurut Trygve Mathisen mempunyai beberapa macam arti, yaitu :

1. Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
2. Sejarah baru dari politik internasional.
3. Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti: semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.
4. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. (Mathisen, 1959)

Selanjutnya, pengertian hubungan internasional juga dikemukakan oleh Suwardi Wiriaatmadja yang menyatakan bahwa :

Hubungan internasioanal lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubngan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak, dan cara berpikir dari manusia. (Wiriaatmadja, 1970)

Setiap negara melakukan hubungan internasional atau berinteraksi dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral pada dasarnya merupakan perwujudan dari kepentingan nasionalnya, dalam melihat kasus etnis Tionghoa dalam proses partisipasi politik, sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia dan Malaysia saja, akan tetapi sudah merupakan masalah internasional, hal ini terbukti dari kekhawatiran Amerika Serikat dan negara-negara maju akan bangkitnya perekonomian Cina dan kuatnya posisi politik Cina di panggung

internasional, yang membawa dampak pada penyebaran etnis Tionghoa dimuka bumi ini.
(Brahm, 2002)

Dengan demikian negara sebagai suatu realitas sosial tidak dapat terlepas dari kekuasaan pemerintahannya, dan juga tidak mungkin adanya suatu kekuasaan negara yang terlepas dari partisipasi individu atau masyarakat yang merupakan *sub stratum personal* negara. Negara tanpa masyarakat atau wilayah negara merupakan suatu fiksi besar, karena negara dapat diartikan sebagai kumpulan orang atau rakyat yang tinggal disuatu tempat atau wilayah tertentu yang terorganisir secara politis dibawah suatu pemerintahan. (Budiardjo, 1993)

Di dalam masyarakat internasional tidak satu negara pun dapat mengisolasi dirinya dari pergaulan internasional, karena merupakan suatu kelompok dari unit sistem di sebut Hubungan Internasional. Interaksi negara-negara tersebut akan mencakup segala aspek yang dikemukakan oleh K.J. Holsti, sebagai berikut :

...hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi, di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri, atau politik internasional, dan meliputi segala hubungan di antara berbagai negara dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang merah internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.
(Holsti, 1987)

Pada dasarnya hubungan internasional lebih mengacu dan merupakan segala bentuk interaksi hubungan, baik hubungan diantara negara secara institusional, maupun secara individu sebagai unit politik dalam sistem internasional. Dan interaksi di antara negara-negara tersebut sangat beraneka ragam yang menyangkut hubungan di berbagai dimensi baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi yang pada hakekatnya dilakukan untuk merealisasikan kepentingan negara-negara yang bersangkutan.

Negara merupakan suatu bentuk organisasi politik terbesar di mana fungsi-fungsi politik di dalamnya merupakan unsur-unsur penting yang menggerakkan suatu proses pengambilan keputusan. Salah satu komponen sahnya berdiri suatu negara ialah penduduk yang menetap diwilayah negara tersebut. Dan dalam proses interaksinya tidak terlepas dari aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah setempat atau pun yang berlaku secara terus-menerus dari penduduk yang bersangkutan.

Aturan-aturan tertulis mengenai status hukum seseorang yang mendiami suatu wilayah negara tertentu yang disebut dengan warga negara sedangkan pewarganegaraan merupakan proses seorang individu untuk ditetapkan menjadi warga negara. Negara pada dasarnya dibuat untuk melindungi warga negaranya secara hukum, maka hukum yang mengaturnya pun tidak hanya berupa hukum nasional melainkan hukum yang melewati batas-batas nasional. Terutama jika terjadi persengketaan antara warga negara yang berbeda.

Sesepakat dengan kenyataan di atas, T. May Rudy memberikan gambaran mengenai kewarganegaraan seseorang dalam perspektif hubungan internasional, sebagai berikut :

Nasionalitas (kewarganegaraan) seseorang merupakan keadaan yang terus menerus dan bukan suatu fakta fisik yang terjadi pada suatu peristiwa tertentu — adalah suatu hubungan internasional yang terus menerus antara negara yang berdaulat di satu pihak dari warga negara di pihak lain. Landasan pokok nasionalitas seseorang adalah keanggotaannya pada suatu masyarakat politik yang independen. Hubungan hukum ini meliputi hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan kedua belah pihak, di pihak warga negara juga tidak kurang dari pada pihak negara itu. (Rudy, 2002)

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa, kewarganegaraan merupakan suatu usaha yang terus menerus dilakukan oleh individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari suatu negara, karena dengan kepemilikan kewarganegaraan, seorang warga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila, seorang warga negara mendapat permasalahan hukum diluar dari negaranya, maka

negara dapat memberikan bantuan hukum kepada warga negara tersebut agar hak-haknya dapat terlindungi dari berbagai ancaman hukuman negara lain.

Adapun kesepakatan-kesepakatan internasional yang juga mengatur masalah *nationality* itu dikarenakan intensitas proses interaksi antara warga negara yang berbeda semakin sering dan kompleks. Selain pelakunya individu, baik orang perorang maupun perusahaan dan organisasi, juga aktor-aktor negara yang biasanya masalah yang dihadapi lebih besar dari menyangkut kebijakan.

Secara etnis suatu negara bangsa dapat bersifat heterogen atau homogen, negara yang diklasifikasikan sebagai negara heterogen mencakup sejumlah kelompok etnis-etnis yang memiliki rasa kebangsaan yang diaktualisasikan atau yang baru tumbuh dalam masyarakat atau bangsa. Pada masyarakat yang multiras umumnya akan muncul kelompok mayoritas (*Majority Groups*) dan kelompok minoritas (*Minority Groups*). Louis Wirth mendefinisikan kelompok minoritas sebagai berikut :

Kelompok minoritas adalah sekelompok orang yang karena karakteristik fisik atau budaya terpisah dari kelompok yang lain dalam masyarakat dimana mereka seringkali diperlakukan berbeda dan menjadi objek diskriminasi politik, sedangkan kelompok mayoritas adalah kelompok yang dominan dengan hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang lebih tinggi. (Wirth, 1945)

Etnis Tionghoa merupakan kelompok minoritas, baik di Malaysia maupun Indonesia, karena di kedua negara tersebut etnis melayu merupakan kelompok masyarakat mayoritas yang dominan menguasai kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena dominannya, maka perlakuan diskriminasi yang ditentukan pada kaum minoritas tidak lepas dari perasangka (*prejudice*) dari kaum mayoritas yang pada hakekatnya itulah yang memunculkan diskriminasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar dari diskriminasi kepada kelompok minoritas adalah nominasi dari kelompok mayoritas. Joe R Feajin mengemukakan diskriminasi, adalah sebagai berikut :

“Diskriminasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota dari kelompok-kelompok dominan yang membawa pengaruh yang berbeda bahkan berbahaya bagi anggota dari kelompok yang tidak dominan”. (Feagin, 1995)

Kelompok dominan kadangkala menggunakan perbedaan manusia didasarkan pada ras atau etnis sebagai pemicu masalah sara, hal ini terbukti pada beberapa kasus perselisihan etnis Tionghoa dan melayu di Indonesia terutama dalam perebutan hak politik, di Indonesia permasalahan etnis Tionghoa dan Melayu didasarkan pada adanya kecemburuan etnis Melayu terhadap kemakmuran ekonomi yang dialami etnis Tionghoa, sehingga meletuslah tragedi Mei 1998 dan sebelumnya peristiwa ditahun 1960 an dimana etnis Tionghoa dideskriditkan karena anggapan bahwa RRC terlibat dalam G-30 S/PKI. (Yatsuko, 2002)

Karenanya, dalam membuat kebijaksanaan pemerintah kepentingan warga negara merupakan prioritas perhatian, sebab warga negara adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya dan antara warga negara dan negaranya mempunyai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dan adanya perbedaan khusus terhadap etnis tertentu. Seperti yang ditegaskan oleh pasal 1 Montefidio Convention 1933: *On the right and duties of states*, yang dikutip oleh CF. Isjwara, menyebutkan bahwa : *“Salah satu syarat untuk dapat diakui sebagai negara adalah adanya warga negara atau penduduk dan wilayah tertentu. Dengan demikian masalah yang menimpa warga negaranya merupakan suatu masalah yang prinsipal dalam kehidupan bernegara”.* (Isjwara, 1966)

Berdasarkan kutipan di atas, negara benar-benar memiliki kewajiban untuk membela kepentingan dan melindungi warga negaranya, selain itu suatu negara berhak pula menentukan kewanganegaraan para warga negaranya yang dikenal dengan dua asas umum yang digunakan, yaitu:

- a. Asas kelahiran (*Ius Soli*), maksudnya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.
- b. Asas keturunan (*Ius Sanguinis*), yang memandang bahwa kewarga negaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan. (Rudy, 2002)

Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memilih asas yang akan dianutnya dalam menentukan siapa dan apa status warga negaranya, tetapi kebebasan disetiap negara untuk memilih asas ketentuan kewarganegaraan itu ternyata dapat menimbulkan masalah. Orang-orang yang dilahirkan kemudian tinggal disuatu negara yang undang-undang kewarganegaraannya menganut asas ius soli akan terlibat dalam masalah kewarganegaraan apabila negara asal orang asing tersebut memiliki undang-undang kewarganegaraan yang menerapkan ius sanguinis, sebab bagi suatu negara yang ketentuan atau undang-undang kewarganegaraannya menganut asas ius soli maka orang-orang keturunan bangsa asing yang dilahirkan dinegara itu dianggap sebagai warga negara dimana ia tinggal, mereka dianggap memenuhi persyaratan yang diminta oleh ketentuan atau undang-undang kewarganegaraannya yang berlaku.

Setelah seseorang menjadi warga negara tertentu, akan mengalami prosos asimilasi dan partisipasi politik. Karena dengan demikian akan membawa pengaruh terhadap penerimaan terbuka dari masyarakat setempat atas kewarganegaraan yang baru diperoleh seseorang tersebut. Stuart W. Greif mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia yang dikuti oleh I. Wibowo, sebagai berikut : *“Sekarang tidak banyak orang di bawah usia 40 tahun yang bisa membaca atau menulis huruf Cina, dan di Jawa terutama, bahasa Cina dalam percakapan di rumah sudah lenyap dan digantikan dengan bahasa Indonesia”*. (Wibowo, 1999)

Proses partisipasi politik di kepulauan Jawa pada umumnya telah mengalami kemajuan, namun pada daerah-daerah lain di Indonesia masih mendapat tantangan yang berarti dari masyarakat setempat, seperti di pulau Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya. Hal ini, diakibatkan oleh sulitnya etnis Tionghoa untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat. (Giap, 1986)

Selebihnya, masalah kewarganegaraan juga merupakan masalah ras yang akan mengganggu kondisi keamanan dan kesejahteraan negara, seperti yang dialami oleh negara Indonesia dengan Malaysia, dimana masalah etnis Tionghoa berlarut-larut dan mengganggu keamanan dan setabilitas nasional.

Sedangkan masalah keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sebagai salah satu ras minoritas namun memiliki akses ekonomi yang kuat terhadap pembangunan bangsa, disampaikan oleh Kwik Kian Gie, sebagai berikut :

...masyarakat Tionghoa di Indonesia relatif kecil sebesar tiga persen dari jumlah pendudukan di Indonesia, namun etnitas Tionghoa di Indonesia kadang menjadi sumber masalah sebagai akibat dari lahirnya kecemburuan ekonomi. Pada kasus tersebut, selanyaknya kesalahan manajemen pemerintahan mengenai ras tidak diarahkan terhadap masyarakat Tionghoa semata, namun dapat dijadikan cerminan dari kegagalan pemerintah dalam membangun kesadaran etnis bersama dalam kerangka persamaan politik yang lebih luas dan berimbang. (Gie, 1996)

Memperhatikan pendapat di atas, penulis melihat adanya masalah yang krusial antara masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa dari segi ekonomi. Kwik Kian Gie menyadari kecemburuan terhadap etnis Tionghoa didasarkan pada terjadinya kesenjangan kemakmuran ekonomi antara etnis Tionghoa dengan etnis Melayu di Indonesia.

G. Eksistensi Kewarganegaraan sebagai Penyelesaian Masalah Etnis di Suatu Negara.

Etnis adalah sekumpulan manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Bangsa dapat merupakan suatu kumpulan penduduk dari suatu negara yang bersatu (dipersatukan) di bawah suatu pemerintah (single) yang merdeka.

Dalam artian ini kata bangsa (*National*) adalah sinonim dengan kata negara (*state*). (Hidayat, 1977)

Tetapi suatu hubungan (*nation*) dapat juga merupakan setiap kumpulan rakyat (*people*) yang mempunyai lembaga-lembaga dan adat istiadat yang sama, *homogenitas* (persamaan) sosial dan kepentingan bersama. Jadi menurut artian ini, beberapa etnis dapat melakukan suatu proses partisipasi politik sehingga dapat hidup dalam suatu negara, atau suatu bangsa dapat melampaui batas-batas suatu negara (hidup atau tinggal di beberapa negara). Bangsa dalam arti yang tempat (*strict*) adalah suatu istilah *sosio kultural* dan dapat dipergunakan tanpa dihubungkan atau digabungkan dengan arti hukum atau arti politik. (Rasyid, 2000)

Proses politik kewarganegaraan sering merupakan satu-satunya penyelesaian masalah hubungan antara satu individu dan suatu negara, yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional kepada individu tersebut. Nasionalitas dapat didefinisikan sebagai status hukum keanggotaan kolektivitas individu-individu tersebut.

Setiap negara anggota mempunyai warga negaranya sendiri yaitu bangsanya, tetapi sebagian tambahannya terdapat status yang menunjukkan keanggotaannya pada suatu negara (pewarganegaraan) yang terdiri dari etnis-etnis tertentu di luar dari etnis yang ada. Memang beragam kaidah perbauran (partisipasi politik) yang berbeda-beda berkenaan dengan proses pewarganegaraan yang asli, dapat dibedakan berdasarkan :

1. Ras.
2. Keanggotaan atau kewarganegaraan dari negara bagian atau propinsi-propinsi suatu federasi.
3. Hak untuk perlindungan diplomatik.

4. Hak-hak kewarganegaraan, yang dapat dihapuskan dari orang yang menjadi warga negara.
(Rasyid, 2000)

Praktek negara-negara memperlihatkan, bahwa proses kewarganegaraan dapat diperoleh dengan cara-cara pokok, berikut ini:

- a. Melalui kelahiran baik menurut asas *jus soli* (tempat kelahiran) ataupun asa *jus sanguinis* (nasionalitas orang tua pada saat kelahiran) atau menurut keduanya.
- b. Melalui naturalisasi (pewarganegaraan), baik dengan cara perkawinan seperti apabila seorang isteri memperoleh kewarganegaraan suaminya, atau dengan legitimasi, atau melau pemberian kewarganegaraan atas dasar permohonan kepada pihak berwenang dari negara
- c. Para penduduk dari wilayah yang ditaklukan atau diserahkan dapat memperoleh nasionalitas dari negara yang menaklukannya, atu negara yang diserahi negara tersebut. (Isjwara, 1966)

Undang-undang dari masing-masing negara menentukan bahwa proses kewarganegaraan seseorang ditentukan, berdasarkan :

- a. Tempat dimana orang tuanya berasal (garis keturunan penduduk asli) (*Jus Sanguinis*).
- b. Hubungan darah atau garis keturunan (*Jus Sanguinis*) dan oleh pernyataan tempat kelahiran (*Jus Soli*). *Jus Sanguinis* dianggap setara dengan *jus soli*.
- c. Hubungan darah atau garis keturunan (*Jus Sanguinis*) dan sebagian melalui tempat kelahiran (*Jus Soli*). *Jus Sanguinis* lebih utama dibanding *Jus Soli*.
- d. Tempat kelahiran (*Jus Soli*). (Rudy, 2002)

Kurangnya keseragaman dalam perundang-undangan negara menyebabkan timbulnya permasalahan etnis yang mengganggu karena adanya kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) atau tuna kewarganegaraan (*apartride*) dan masalah kekuatan hukum warga negara wanita kawin. Karena perselisihan undang-undang kewarganegaraan dan kurangnya keseragaman dari

undang-undang nasional, maka sering timbul bahwa individu-individu tertentu memiliki dwi kewarganegaraannya, (*double nationality*). Contoh yang sering terjadi adalah kasus seorang wanita, yang menikah dengan laki-laki yang tidak sama kewarganegaraannya, yang tetap dapat mempertahankan kewarganegaraannya itu menurut hukum negara asalnya dan memperoleh kewarganegaraan suaminya menurut hukum negara suaminya.

Dwi-kewarganegaraan juga dapat muncul dari kelahiran di wilayah suatu negara, yang bukan negara kewarganegaraan orang tuanya, meskipun biasanya seorang yang belum dewasa diberikan kesempatan untuk memilih kewarganegaraan yang satu atau yang lain setelah mencapai kedewasaannya tahun 1930 memuat beberapa kesulitan yang timbul dari kewarganegaraan ganda. Yang sangat penting adalah Pasal 5, yang menentukan bahwa dalam sebuah negara ketiga seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan dan negara ketiga tersebut akan mengakui hanya salah satu, yaitu:

- a. Kewarganegaraan dari negara di mana ia biasa tinggal dan tempat tinggal utama; atau
- b. Kewarganegaraan dari negara di mana dalam hal-hal tertentu ia tampak berhubungan paling erat.

Ayat (1) Pasal 9 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* menentukan, “Negara-negara peserta perjanjian akan memberikan hak-hak yang sama kepada wanita sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan mereka. Negara-negara akan menjamin secara khusus bahwa baik perkawinan dengan seorang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, yang menyebabkan tuna-kewarganegaraan atau memaksanya memperoleh kewarganegaraan suami”. (Rudy, 1994)

Proses kewarganegaraan baik secara politik, hukum maupun sosial budaya merupakan suatu bentuk penyelesaian etnis yang konkret pada suatu negara. Karena perubahan-perubahan kedaulatan atas wilayah dan karena denasionalisasi oleh negara tempat orang bersangkutan berkewarganegaraan melahirkan adanya proses partisipasi politik etnis yang dilakukan oleh individu dalam menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang didiaminya, sehingga proses partisipasi politik tersebut dapat mempersempit ruang bagi timbulnya perbedaan pandangan dan perselisihan antar etnis, serta eksistensi etnis Tionghoa di suatu negara dapat diterima baik oleh masyarakat pribumi.

H. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Negara-negara di Dunia.

Semakin berperannya orang-orang Tionghoa, dan makin tersebarnya peradaban Tionghoa yang secara agresif, dan menyusup pada seluruh sendi-sendi aktivitas ekonomi dan politik dimana orang-orang Tionghoa itu tinggal di negara-negara bersangkutan.

Di dunia terdapat sekitar 1.180 juta orang Tionghoa. Dan 30 juta di antaranya telah merantau ke 130 negara. Di kawasan Asia Tenggara terdapat 20 juta orang etnik Tionghoa dan peran mereka dibidang ekonomi dan bisnis makin dominan. Mereka yang kini tinggal di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5 juta orang. (Jatmiko, 2000)

Orang-orang Tionghoa yang tinggal di seluruh penjuru dunia itu, baik di negara-negara maju, maupun negara berkembang, bahkan negara terbelakang, adalah orang-orang Tionghoa yang kebanyakan berprofesi pedagang. Tidak terkecuali yang khusus tinggal di kota-kota besar, bahkan sampai di desa-desa terpencil, disitu akan dijumpai aktivitas bisnis orang-orang Tionghoa. Baik mereka yang telah beralih menjadi warga di negara-negara di dunia, maupun yang melakukan usaha patungan dengan partner lokalnya di negara bersangkutan.

Globalisasi ekonomi dunia yang belakangan ini banyak dibicarakan, sesungguhnya merupakan isu yang terlambat, lebih didahului oleh gerakan Cinanisasi orang-orang Tionghoa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka, orang-orang Tionghoa yang melakukan kontak jaringan bisnis efektif antar sesama kaumnya, dan memiliki sentral koordinasi bisnis yang berbasis di Hongkong dan Singapura telah menerapkan jaringan komunikasi yang sangat memungkinkan bagi kemajuan para pengusaha etnis Tionghoa di penjuru dunia.

Sungguh ironis kejadiannya, kalau masyarakat Barat selama ini dikenal sebagai pencerminan masyarakat kapitalis dan negeri Daratan Cina dikenal dengan pemerintahan sistem komunis, tetapi orang-orang yang negerinya berbasis komunis inilah yang justru secara konsisten melakukan praktek kapitalisme di penjuru dunia dan ternyata berhasil.

Apa sebenarnya yang orang-orang Tionghoa perdagangkan, tak lain adalah peradaban mereka orang-orang Tionghoa itu, rata-rata berangkat dari dasar *nol*. Merantau ke berbagai negara, semula sebagai kaum gembel. Kemudian melakukan bisnis kecil-kecilan, lama-lama menjadi maju dan membesar menjelma menjadi pengusaha jaringan ekonomi, karena mereka memiliki peradaban maju.

Para ahli menyatakan bahwa, peradaban Tionghoa dianggap sebagai pusat kebudayaan di Timur, oleh karena dianggap yang paling tua dan terkaya yang diketahui manusia, baik pada masa kuno *Chung-kuo*, maupun pada masa modern. Pada perkembangannya kemudian, semuanya itu telah mendapat pengaruh dari peradaban Barat.

Peradaban Tionghoa telah merambah begitu cepat melalui orang-orang Tionghoa yang tersebar di penjuru dunia. Tersebar nya basis-basis politik dan bisnis orang-orang Tionghoa tersebut telah menapak dalam berbagai wujud. Bahkan sering dituduhkan oleh banyak

kalangan, bahwa mereka sebagai kaum yang lihai membina kolusi halus dengan kelompok penguasa politik di suatu negara.

Apabila kaum Tionghoa telah mampu mengembangkan peranan politiknya di setiap negara, dan mereka menjadi penguasa ekonomi di tiap negara bersangkutan, maka tidak heran kalau kebijaksanaan ekonomi negara tersebut sangat terprogram oleh pengaruh perilaku ekonomi yang didominasi oleh kaum Tionghoa. Untuk ajang kelangsungan hidup bisnis para pemodal kaum Tionghoa tersebut, tidak jarang kebijaksanaan ekonomi makro bertolak dari kontribusi yang dilakukan para pelaku bisnis kaum Tionghoa yang beroperasi di negara bersangkutan.

Golongan minoritas di banyak negara merupakan sumber utama dari permasalahan golongan minoritas ini, adalah tata kehidupan norma-norma yang berlaku dalam tradisi masyarakatnya, terutama sikap fanatisme terhadap tradisi negara leluhurnya. Hal inilah yang menjadi sumber perselisihan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi, yang berarti ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh ahli pikir Tionghoa di negeri leluhurnya, yang pernah jaya dan yang kemudian dijadikan pedoman dan landasan kehidupan sosial kultural masyarakat Tionghoa selanjutnya di negara manapun. Hal mana, yang sangat besar sekali pengaruhnya kepada orang-orang Tionghoa perantau, terutama dari tokoh-tokoh, seperti, *Konfucius* pada abad ke -6 SM, ajaran *Karl Mark*, dan *Tseng Kuo-fan* pada abad 19 serta ajaran *Yuan Shih-kai* pada permulaan abad ke-20. Ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh tersebut banyak memberikan pengaruh pada perkembangan dasar berpikir, pandangan hidup dan filsafat orang Tionghoa. (Brahm, 2002)

Teoisme merupakan ajaran yang pertama bagi orang Tionghoa, yang merupakan suatu spekulasi filsafat. Seperti pada umumnya dasar pandangan hidup ini di Asia Timur menetapkan pada keharmonisan hubungan antar manusia dan alam semesta. *Teoisme* didasarkan atas ajaran

Tao yaitu, jalan yang seharusnya atau jalan yang benar (*wu-wei*). Dengan Tao manusia dapat menghindarkan dari segala keadaan yang bertentangan dengan ritme atau irama alam semesta. Teoisme diakui sebagai pre-sistematik berpikir terbesar didunia sebagai suatu filsafat yang bersifat mistik yang telah mempengaruhi cara berpikir orang Tionghoa sampai abad ke 20. (Yatsuko, 2002)

Sejak dahulu mereka telah memberikan keyakinan bahwa orang Tionghoa sebagai pusat pemerintahan dan politik dunia. Dasar pemikiran inilah yang kemudian diteruskan dengan penyebaran ideologi komunis, sehingga dengan penyebaran ajaran komunis Cina ada hubungan dengan cita-cita lama dari Tionghoa kuno yakni sebagai pusat superior di dunia. Itulah sebabnya pemerintahan Cina selalu mengirmkan para kadernya ke negara-negara di mana kaum emigran Tionghoa berada. Hasil pembinaan ini menghasilkan suatu sifat khas orang Tionghoa, tetap mempertahankan pola pemikiran, perbuatan, dan pola kehidupan tradisi leluhurnya. (Suryadinata, 1981)

Untuk mempertahankan sikap hidup tradisi itu mereka berusaha agar dalam setiap keadaan, harus melebihi tingkat kehidupan kaum pribumi, dimana saja mereka berdomisili. Walaupun semula ketika mereka datang sebagai pengembara dan rata-rata dari mereka tidak mempunyai bekal material apa-apa, akan tetapi dengan kemampuan bersikap teguh, bekerja keras, tekun dan sabar serta hemat dalam pengeluaran, akhirnya mereka menonjol dalam tingkat kehidupan ekonominya dibandingkan kehidupan ekonomi penduduk pribumi. Sifat utama rata-rata orang Tionghoa ini, pada mulanya dalam setiap memulai usaha biasanya dilakukan atas kerjasama dalam keluarga. Memupuk sikap saling menolong di antara sesama anggota keluarga, berusaha hemat dalam pengeluaran, menjalankan pekerjaan dengan teliti, rapi. Pembawaan yang khas ini, yang rupanya menolong kehidupan mereka bisa berhasil dalam

berdagang, dan dalam perkembangan sejarah perekonomian di Asia umumnya sering didominasi oleh orang-orang etnis Tionghoa seperti ini. (Jahja, 1994)

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis menarik konklusi, sebagai berikut: “Keterlibatan politik etnis Tionghoa di Malaysia telah memberikan inspirasi bagi etnis Tionghoa di Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia”,

Berdasarkan kerangka pemikiran dan konklusi di atas, penulis dapat menarik asumsi, sebagai berikut:

- a. Keberadaan etnis Tionghoa di Malaysia maupun di Indonesia melahirkan kecemburuan ekonomi pada etnis Melayu, karena etnis Tionghoa lebih berhasil dan lebih menikmati kemakmuran ekonomi dibidang etnis melayu.
- b. Keterlibatan politik etnis Tionghoa di Malaysia memberikan kontribusi bagi proses partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia, yang ditandai dengan adanya menteri-menteri dari etnis Tionghoa.
- c. Adanya keinginan dari pemerintah Malaysia maupun Indonesia untuk menyelesaikan masalah etnis Tionghoa di kedua negara.

I. Hipotesis.

Berdasarkan masalah penelitian dan rangka pemikiran yang diuraikan sebelumnya, penulis menarik hipotesis yaitu : **“Jika invetasi China dijalankan secara konsisten dengan kebijakan *turn-key project management* di Indonesia, maka etnis Tionghoa Indonesia mendapat dukungan moral untuk berperan aktif dalam bidang politik, yang ditandai dengan adanya etnis Tionghoa dalam lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia”.**

Untuk menyamakan persepsi dan memudahkan pembahasan dan lebih lanjut, penulis mengemukakan suatu definisi operasional terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan hipotesis, sebagai berikut:

1. Kebijakan *turn-key project management* dalam investasi adalah kegiatan investasi baik pemerintah maupun swasta China di Indonesia dengan mewajibkan kepada Indonesia untuk menerima penyertaan tenaga kerja asing China pada proyek-proyek yang dibiayai China di Indonesia.
2. Kebebasan etnis Tionghoa di Indonesia, merupakan langkah yang dapat mempercepat proses partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia.
3. Proses partisipasi etnis Tionghoa di Indonesia ialah usaha yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan, dengan harapan diterimanya etnis Tionghoa oleh masyarakat Indonesia baik dalam bidang politik maupun ekonomi tanpa menciptakan ketegangan dan kecemburuan sosial.

J. Operasionalisasi Variabel Penelitian.

Operasionalisasi variabel dapat penulis uraikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas : Jika investasi China dijalankan secara konsisten dengan kebijakan <i>turn-key project management</i> di Indonesia	1. Investasi China di Indonesia 2. <i>Turn-key project management</i>	Selama hampir lima tahun, nilai FDI (<i>Foreign Direct Investment</i>) China di Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga 559 persen. Pada 2015, investasi China hanya sebesar 0,63 miliar dollar AS dan menjadi 3,51 miliar dollar AS pada 2020. (Kompas, 2021) Masyarakat tengah khawatir dengan masuknya WNA asal Tiongkok dalam kapasitas besar ke Indonesia. Kasus ini berawal dari <u>Turn-key Project Management</u>

		yang disepakati dengan pemerintah Indonesia. <u>Turn-key Project</u> mengatur bahwa mereka masuk investasi tetapi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari mereka. <u>Turn-key Project</u> inilah yang kemudian ditantadatangani oleh pemerintah dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. (Yusuf, 2016)
Variabel terikat : Maka etnis Tionghoa Indonesia mendapat dukungan moral untuk berperan aktif dalam bidang politik, yang ditandai dengan adanya etnis Tionghoa dalam lembaga legislatif di Indonesia	<p>1. Etnis Tionghoa Indonesia berperan aktif dalam bidang politik</p> <p>2. Etnis Tionghoa dalam lembaga legislatif di Indonesia</p>	<p>Fenomena ini menjadi menarik untuk ditelisik, karena keterlibatan elit partai etnis Tionghoa di suatu kancah perpolitikan memiliki banyak motif untuk aktif dalam suatu kegiatan. Keadaan lain yang mendukung adalah berbagai macam produk hukum maupun kondisi sosial, ekonomi dan perpolitikan yang makin menunjukkan kearah yang perbaikan. (Yusuf Rahmat <i>et. al</i>, 2014 : 1)</p> <p>UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. (Jessi Carina, 2017 : 1)</p>

K. Skema Teoritik Penelitian.

Skema teoritik penelitian kedua variabel yang dapat penulis sajikan, sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Skema Teoritik Penelitian

